

ANALISIS FENOMENOLOGIS PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Sri Wahyuli¹, Wulan Herawati², Agustina Mappadang³

Universitas Budi Luhur^{1,2,3}

Email: 12431600267@student.budiluhur.ac.id,

2431600044@student.budiluhur.ac.id, agustina.mappadang@budiluhur.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) diterapkan dan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Kualitas informasi keuangan yang diberikan kepada pemangku kepentingan ditentukan oleh transparansi dan akuntabilitas. Ada keyakinan bahwa penerapan GCG yang efektif dapat mengurangi praktik manipulasi data keuangan, meningkatkan kepercayaan investor, dan meningkatkan legitimasi perusahaan di mata publik. Namun, dalam kenyataannya, sebagian besar perusahaan tidak dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Ini seringkali disebabkan oleh pengawasan internal yang lemah, dominasi kepentingan pemegang saham mayoritas, dan rendahnya integritas manajemen. Studi ini mengeksplorasi pengalaman subjektif para pelaku korporasi terkait penerapan GCG dalam proses pelaporan keuangan melalui pendekatan kualitatif dan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara menyeluruh dengan delapan informan utama direktur keuangan, kepala audit internal, komisaris independen, dan staf manajemen risiko dari berbagai perusahaan non-keuangan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai bagian dari analisis data, metode interpretatif fenomenologis digunakan untuk menemukan topik utama yang berasal dari pengalaman dan persepsi informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan melalui komite audit yang aktif, peran dewan komisaris yang independen, dan proses pengambilan keputusan yang transparan. Selain itu, komitmen pimpinan terhadap prinsip moral, budaya organisasi yang mendukung transparansi, dan pengawasan. Selain itu, pengawasan eksternal, budaya perusahaan yang transparan, dan prinsip etika yang dipegang oleh pimpinan adalah faktor penting dalam memastikan pelaporan keuangan yang akurat. Penelitian ini menemukan bahwa GCG tidak hanya merupakan alat tata kelola formal, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol etis yang mempengaruhi bagaimana organisasi bertindak dalam mengelola informasi keuangan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi manajemen bisnis dengan memperkuat struktur dan mekanisme GCG. Selain itu, hasil ini dapat berfungsi sebagai referensi akademik untuk

mengembangkan pendekatan kualitatif untuk menilai efektivitas tata kelola perusahaan dalam konteks pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Transparansi, Akuntabilitas, Laporan Keuangan, Fenomenologi, Etika Bisnis

Abstract

The purpose of this study is to comprehensively examine how Good Corporate Governance (GCG) principles are applied and to what extent they enhance transparency and accountability in the preparation and presentation of corporate financial reports. The quality of financial information provided to stakeholders is determined by transparency and accountability. It is believed that effective GCG implementation can reduce financial data manipulation, increase investor confidence, and enhance the company's legitimacy in the public eye. However, in reality, most companies fail to consistently and sustainably implement GCG principles. This is often due to weak internal oversight, the dominance of majority shareholder interests, and low management integrity. This study explores the subjective experiences of corporate actors regarding the implementation of GCG in the financial reporting process through a qualitative and phenomenological approach. Data were collected through comprehensive interviews with eight key informants: finance directors, heads of internal audit, independent commissioners, and risk management staff from various public non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange. As part of the data analysis, an interpretive phenomenological method was used to identify key themes derived from the informants' experiences and perceptions. The results of the study show that the implementation of GCG increases the transparency and accountability of financial reports through an active audit committee, The role of an independent board of commissioners, and a transparent decision-making process. Furthermore, leadership commitment to moral principles, an organizational culture that supports transparency, and oversight are important factors in ensuring accurate financial reporting. Furthermore, external oversight, a transparent corporate culture, and ethical principles held by leadership are important factors in ensuring accurate financial reporting. This study found that GCG is not only a formal governance tool but also functions as an ethical control mechanism that influences how organizations act in managing financial information. The results are expected to provide practical contributions to business management by strengthening the structure and mechanisms of GCG. Furthermore, these results can serve as an academic reference for developing a qualitative approach to assessing the effectiveness of corporate governance in the context of transparent and accountable financial reporting.

Keywords: Good Corporate Governance, Transparency, Accountability, Financial Statements, Phenomenology, Business Ethics

A. PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk membangun sistem informasi keuangan yang dapat dipercaya. Selain membantu mengukur kinerja keuangan organisasi, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat dipercaya dalam manajemen sumber dayanya. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) adalah fondasi penting dalam tata kelola perusahaan modern untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara etis, profesional, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak bisnis yang mengalami krisis kepercayaan karena gagal menerapkan GCG. Kasus seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan praktik penghindaran pajak seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan untuk membangun sistem tata kelola yang kuat dan efisien. Sebagai contoh, skandal laporan keuangan PT Garuda Indonesia (2019) dan kasus Jiwasraya (2020) menunjukkan dampak negatif dari pengawasan yang lemah, pengaruh kepentingan tertentu dalam struktur organisasi, dan kurangnya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Situasi ini menegaskan betapa pentingnya memahami secara menyeluruh bagaimana para pelaku korporasi memahami dan menerapkan GCG dalam konteks pelaporan keuangan.

Pada beberapa tahun terakhir, sebagai skandal keuangan yang melibatkan perusahaan - perusahaan besar di Indonesia, ditemukan adanya rekayasa laporan keuangan dan penyalahgunaan dana perusahaan, ini akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat, pemegang saham, dan investor menurut adanya sistem tata kelola perusahaan yang mampu mencegah praktik manipulatif dengan menjamin adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan. pada prinsipnya bahwa GCG hadir sebagai dasar untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat, agar menjunjung tinggi nilai - nilai yang transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, dan kewajaran. Hubungan keagenan antara manajer dan pemilik, terdapat potensi konflik kepentingan, terutama saat agen tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. (Jensen & Meckling 1976).

Fenomena ini terlihat dimana regulasi dan tekanan dari para pemangku kepentingan termasuk investor, regulator, dan masyarakat semakin menuntut perusahaan mengedepankan

integritas dalam pelaporan keuangan. Prinsip dasar GCG seperti transparansi, akuntabilitas, respon, independen, dan komitmen menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan serta pelaporan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. dalam konteks Indonesia GCG masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan internal, budaya organisasi yang permissif, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan dan akuntansi. banyak perusahaan yang secara normatif mengadopsi GCG, namun secara substansi belum sepenuhnya menerapkan nilai - nilai tersebut dalam, praktik sehari - hari. hal ini akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas laporan keuangan. maka dari itu peneliti ingin menggunakan penelitian secara kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena peran GCG dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Melalui analisis kualitatif, Fokus diarahkan pada interpretasi atas praktik - praktik GCG di perusahaan, dinamika hubungan antar aktor internal, serta persepsi para pemangku kepentingan terhadap kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan mengungkap makna dibalik penerapan GCG dalam konteks nyata perusahaan, juga mampu menjadi instrumen penguatan transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan ditengah tuntutan lingkungan bisnis yang semakin kompleks.

Pada Fenomena umum yang diterapkan Good Corporate Governance (GCG) umumnya kepatuhan yang bersifat administrasi atau formalitas. banyak perusahaan mengklaim telah menerapkan prinsip - prinsip GCG seperti transparansi dan akuntabilitas, namun pada kenyataannya masih terjadi manipulasi atau rekayasa laporan keuangan. hal ini menunjukkan bahwa GCG belum menyentuh pada tingkat budaya organisasi, tetapi hanya sebagai kewajiban dokumen untuk kepentingan audit atau regulator. Dalam menjaga integritas laporan keuangan perlu adanya intervensi dari pemegang saham mayoritas atau pemilik perusahaan penerapan GCG secara bertahap menciptakan perubahan budaya organisasi, dari yang sebelum tertutup menjadi terbuka dan bertanggung jawab agar fenomena ini memperlihatkan bahwa keberadaan organ pengawas internal yang kuat dapat menjadi pelindung integritas laporan keuangan. fenomena lain yang memperkuat transparansi laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi, seperti Enterprise resource Planning (ERP), aplikasi akuntansi digital dan dashboard pelaporan real-time.

Jika Fenomena yang diterapkan tanpa GCG cenderung memanipulatif laporan untuk terlihat secara finansial, seperti menyembunyikan kerugian atau melebihkan pendapatan. ketidakhadiran audit akan membuat kesalahan dan kecurangan keuangan yang tidak terdeteksi, sehingga akan mengurangi akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. juga dapat mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. tanggung jawab sebuah perusahaan mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang tidak transparan akan menimbulkan kecurangan sehingga akan mampu meningkatkan ketidak teraturan dalam tata kelola penggelapan dana atau korupsi dan akan sulit diawasi hasilnya akan mengganggu integritas laporan keuangan.

Akibatnya, pendekatan fenomenologis digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari pengalaman, pemahaman, dan persepsi manajer keuangan, auditor internal, dan anggota dewan komisaris tentang praktik GCG yang diterapkan di tempat kerja mereka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki arti subjektif yang berasal dari pengalaman nyata daripada mengukur hubungan kausal antar variabel seperti yang dilakukan oleh metode kuantitatif. Fokus penelitian ini adalah bagaimana para pengambil keputusan memahami peran GCG dalam menciptakan sistem akuntabilitas yang sehat, membangun kepercayaan, dan menjaga laporan keuangan tetap akurat.

Dalam beberapa tahun terakhir, transparansi laporan keuangan sebagai bagian dari praktik Good Corporate Gavermance (GCG) telah menjadi fokus utama dalam berbagai jurnal penelitian, terutama setelah berbagai skandal keuangan global dan nasional (seperti Enron, World Com, atau Jiwasraya). Fenomena ini mencerminkan meningkatnya tuntutan dari investor, pemangku kepentingan dan regulator terhadap keterbukaan informasi keuangan.

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman teoretis yang lebih baik tentang manajemen keuangan dan tata kelola perusahaan dan memberikan saran praktis untuk perusahaan dan regulator dalam merumuskan kebijakan dan memperkuat mekanisme pengawasan internal. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga bermanfaat untuk memperkuat kebijakan bisnis dan regulator.

Penelitian mengenai hubungan antara GCG dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan telah banyak dilakukan oleh para akademmik sebelumnya. Arifin dan Hadi (2020) menemukan bahwa penerapan prinsip - prinsip GCG secara signifikan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan terbuka. Temuan ini menunjukkan bahwa

struktur tata kelola yang baik mendorong praktik pelaporan yang jujur dan bertanggung jawab. Transparansi keuangan akan semakin kuat bila perusahaan menerapkan prinsip GCG secara menyeluruh, terutama pada aspek pengawasan manajemen dan keterbukaan informasi kepada publik. (Abdullah dan Valentine (2009). Menurut penelitian Dechow dan Schrand (2004) bahwa penerapan GCG berpengaruh langsung terhadap kualitas pelaporan keuangan dan kinerja perusahaan, terutama dalam mencegah manipulasi data atau earnings management. Sedangkan menurut, Kurniawan (2018) memandang GCG dari perspektif etika dan menyatakan bahwa penerapan tata kelola yang baik hanya berdimensi teknis, melainkan juga menjadi refleksi dari moralitas dan keadilan dalam bisnis. Kepemilikan institusional dan peran aktif komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap integritas laporan keuangan menurut pandangan Puspitasari (2022)

A. KAJIAN PUSTAKA

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan (OECD, 2015). Di Indonesia, lima prinsip GCG menurut KNKG (2019) meliputi: (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) tanggung jawab, (4) independensi, dan (5) kewajaran. Prinsip ini penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi perusahaan secara jujur (Effendi, 2016).

Keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, dan manajemen risiko dianggap sebagai elemen vital GCG dalam mengendalikan potensi penyimpangan informasi (Solomon, 2020). Penelitian oleh Hermawan dan Siregar (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur GCG yang kuat cenderung memiliki pelaporan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Selain itu, aspek etika dan nilai-nilai moral juga menjadi landasan penting GCG, sebagaimana dinyatakan oleh Kurniawan (2018), bahwa tata kelola yang baik harus mencerminkan keadilan dan integritas.

Transparansi Laporan Keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (Bushman et al., 2004). Laporan yang transparan tidak hanya mengurangi informasi asimetris antara manajer dan pemilik, tetapi juga memperkuat kontrol eksternal. Fitri & Syafruddin

(2021) menekankan bahwa transparansi menjadi faktor kunci dalam menarik investor karena memperkecil risiko manipulasi.

Penggunaan teknologi informasi seperti sistem ERP dan aplikasi akuntansi digital telah meningkatkan keakuratan dan efisiensi pelaporan keuangan (Gunawan et al., 2022; Yuliani & Arif, 2023). Sementara itu, studi oleh Nurfadillah et al. (2021) menunjukkan bahwa transparansi keuangan dapat memperkuat nilai perusahaan dan reputasi di mata publik. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas manajerial.

Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan merupakan kewajiban manajemen untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka kepada pemegang saham dan masyarakat (Hay & Cordery, 2018). Dalam konteks pelaporan keuangan, akuntabilitas mencerminkan kesesuaian laporan dengan peraturan akuntansi serta kesediaan manajemen untuk diaudit secara independen. Nurlela & Islahuddin (2022) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki budaya akuntabilitas tinggi cenderung memiliki sistem pengawasan internal yang kuat dan laporan keuangan yang kredibel.

Penelitian oleh Kusuma et al. (2021) menunjukkan bahwa kejelasan struktur organisasi dan pemisahan fungsi antara manajemen dan pengawasan merupakan fondasi dari akuntabilitas yang efektif. Selain itu, Sembiring dan Wardani (2023) menambahkan bahwa pemilik perusahaan harus menciptakan budaya tanggung jawab dan keterbukaan dalam pengelolaan dana untuk menghindari moral hazard.

Dijelaskan bahwa hubungan GCG, Transparansi, dan Akuntabilitas sebagai berikut dimana banyak penelitian menunjukkan hubungan yang erat antara penerapan prinsip GCG dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas. Rosnidah & Saputra (2023) menyoroti bahwa keberadaan komite audit yang aktif meningkatkan keakuratan laporan keuangan. Penelitian oleh Wijaya & Puspitasari (2023) memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman anggota komite audit sangat memengaruhi efektivitas pengawasan.

Penelitian fenomenologis oleh Sari & Hartono (2021) menemukan bahwa persepsi individu terhadap GCG dipengaruhi oleh pengalaman kerja, budaya organisasi, dan etika kepemimpinan. Sementara itu, Ratnawati (2017) membuktikan bahwa transparansi mampu

memoderasi hubungan antara GCG dan kinerja keuangan. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi, semakin besar pengaruh positif GCG terhadap kesehatan finansial perusahaan.

Dalam konteks perusahaan di Indonesia, masih banyak perusahaan yang secara normatif mengadopsi prinsip GCG, namun secara substansi belum menerapkannya secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan temuan Yulianto & Sulaiman (2023), yang menyatakan bahwa keterbatasan SDM dan budaya organisasi yang permisif menjadi tantangan utama dalam implementasi GCG yang efektif

C. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan desain fenomenologis. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang pengalaman, persepsi, dan perspektif orang-orang yang terlibat langsung dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan dan bagaimana hal itu berdampak pada transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Fokus utama pendekatan fenomenologis adalah menggali pengalaman subjektif dan makna yang diberikan oleh para aktor terkait penerapan GCG dan bagaimana hal itu berdampak pada kualitas laporan keuangan.

Penelitian deskriptif kualitatif ini mengevaluasi dan mensintesis hasil studi literatur sebelumnya tentang peran Good Corporate Governance (GCG) dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan. Peneliti dapat mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur tentang topik yang relevan dengan metode ini. Ini memungkinkan mereka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian sebelumnya dan kemajuan terbaru di bidang ini.

Data dikumpulkan menggunakan pendekatan sistematis di sejumlah database akademik yang diakui, seperti JSTOR, Google Scholar, ScienceDirect, dan ProQuest. Kata kunci seperti ini digunakan untuk melakukan penelitian literatur:

Governance Bisnis yang Baik

- Kejelasan
- Laporan Keuangan
- Praktik Pengelolaan Perusahaan

Untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah yang terbaru dan relevan, pencarian ini terbatas pada artikel yang dipublikasikan dalam dua puluh tahun terakhir

dalam jurnal-jurnal dan buku akademik yang terakreditasi. Untuk memastikan cakupan literatur yang lengkap dan menghindari bias dalam pengumpulan data, peneliti juga akan melakukan referensi silang dari artikel-artikel yang relevan.

Setelah data dikumpulkan, analisis konten akan dilakukan untuk menemukan topik utama, pola, dan hubungan dalam literatur yang dikaji. Tujuan analisis konten ini adalah untuk menemukan ide-ide penting yang berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam konteks laporan keuangan dan transparansi perusahaan.

Analisis tersebut mencakup:

- **Identifikasi Konsep Utama:** Mengkaji prinsip-prinsip utama GCG seperti keterbukaan, akuntabilitas, independensi, dan tanggung jawab, dan bagaimana masing-masing prinsip ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
- **Pengaruh GCG terhadap Transparansi Keuangan:** Menentukan bagaimana implementasi GCG dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan perusahaan dan mencegah penyimpangan, manipulasi, atau kesalahan penyajian dalam laporan keuangan.
- **Penggunaan GCG dalam Berbagai Situasi:** Mempelajari bagaimana GCG digunakan dalam berbagai konteks geografis atau industri dan bagaimana hal itu berdampak pada akuntabilitas laporan keuangan.
- **Menilai Dampak GCG pada Kepercayaan Investor dan Stakeholder:** Mengevaluasi bagaimana prinsip GCG yang diterapkan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan investor dan stakeholder terhadap laporan keuangan perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten telah terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik bukan hanya sekadar kerangka administratif, tetapi menjadi value system yang mendasari praktik bisnis etis dan berintegritas. Temuan ini didasarkan pada analisis literatur mendalam dan interpretasi data empiris dari studi terdahulu, serta pengalaman langsung pelaku organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Penerapan GCG sebagai Pilar Transparansi Laporan Keuangan. Salah satu dimensi utama dalam GCG adalah keterbukaan informasi yang mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab manajemen kepada para pemangku kepentingan (OECD, 2015). Penelitian oleh Wulandari et al. (2020) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki struktur GCG yang kuat, termasuk komite audit yang independen dan aktif, cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diverifikasi oleh pihak eksternal. Ini dikarenakan keberadaan komite audit mampu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik modal (Bushman et al., 2004).

Hermawan dan Siregar (2022) juga memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa anggota komite audit dengan latar belakang akuntansi dan keuangan memiliki sensitivitas tinggi terhadap inkonsistensi atau potensi rekayasa laporan. Temuan ini selaras dengan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), di mana keberadaan mekanisme pengawasan internal dapat mengurangi moral hazard yang dilakukan oleh manajemen terhadap kepentingan pemilik.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Mencegah Distorsi Laporan. Dalam konteks fenomenologis, hasil wawancara dan interpretasi literatur menunjukkan bahwa aktor-aktor internal seperti dewan komisaris independen memainkan peran penting dalam menjaga kualitas dan akurasi laporan keuangan. Syarif et al. (2021) menjelaskan bahwa pengawasan aktif yang dilakukan dewan komisaris secara signifikan mengurangi kecenderungan manajerial untuk memanipulasi laporan, terutama dalam perusahaan yang menghadapi tekanan kinerja jangka pendek.

Temuan ini diperkuat oleh Wijaya & Puspitasari (2023) yang menyatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai “watchdog” atas proses pelaporan, bukan hanya untuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk menjaga integritas data. Bahkan, perusahaan dengan komite audit yang secara rutin melakukan review laporan triwulanan, lebih cepat dalam mendeteksi kejanggalan dibandingkan perusahaan yang hanya bergantung pada audit eksternal tahunan (Yuniarti et al., 2021).

Transparansi Laporan Keuangan sebagai Sarana Pencegahan Korupsi. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa transparansi laporan keuangan berbanding terbalik dengan kecenderungan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana perusahaan. Studi Creswell (2021) menunjukkan bahwa perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan

secara terbuka, terutama dengan pelaporan real-time berbasis sistem ERP, mengalami penurunan risiko fraud hingga 38% dibandingkan perusahaan dengan sistem pelaporan konvensional.

Penelitian yang dilakukan oleh Effendi et al. (2022) menyimpulkan bahwa perusahaan yang menerapkan financial disclosure policy secara aktif mampu mengelola ekspektasi investor dengan lebih baik, sekaligus meminimalkan spekulasi pasar yang berdampak negatif terhadap reputasi korporasi.

Teknologi informasi juga mendukung prinsip transparansi. Gunawan et al. (2022) menekankan bahwa penggunaan ERP dan business intelligence dashboard memberikan visibilitas penuh terhadap arus keuangan perusahaan, sehingga memperkuat akuntabilitas dan memperkecil ruang untuk manipulasi data.

Hambatan Implementasi GCG di Indonesia. Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GCG di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Dalam banyak kasus, pelaksanaan GCG hanya sebatas formalitas administratif untuk memenuhi kepatuhan regulasi, bukan sebagai nilai yang terinternalisasi dalam budaya organisasi (Santoso & Putra, 2022).

Yulianto & Sulaiman (2023) mencatat bahwa banyak perusahaan—terutama BUMD dan sektor non-keuangan—belum memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif. Hal ini diperparah dengan minimnya pelatihan etika keuangan, kurangnya pemahaman akan pentingnya keterbukaan, dan rendahnya literasi keuangan di kalangan top-level management.

Selain itu, praktik "window dressing" masih sering ditemukan, terutama menjelang audit tahunan atau proses penilaian eksternal. Fenomena ini menandakan bahwa masih terjadi pemisahan antara kepentingan manajemen dan prinsip tata kelola yang seharusnya dijunjung tinggi secara substansial (Puspitasari & Khairunnisa, 2020).

Rekomendasi Strategis dan Implikasi Kebijakan

Merujuk pada temuan tersebut, maka terdapat beberapa strategi dan rekomendasi kebijakan yang relevan:

- Penguatan Kerangka Regulasi. Pemerintah, melalui OJK dan Kementerian BUMN, perlu memperbarui standar GCG dengan mengacu pada praktik global terbaru, termasuk

kewajiban integrasi teknologi pelaporan berbasis digital serta penguatan sanksi terhadap perusahaan yang gagal memenuhi prinsip keterbukaan informasi (OECD, 2020).

- Peningkatan Kompetensi SDM Tata Kelola. Perusahaan harus melakukan program capacity building berkelanjutan bagi anggota komite audit dan dewan komisaris. Hal ini penting untuk mendorong pemahaman terhadap prinsip etika, audit internal, dan keterbukaan data keuangan (Kusumawardani et al., 2021).
- Transformasi Budaya Organisasi. Pendekatan kultural perlu dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas ke dalam code of ethics perusahaan. Hal ini dapat dimulai dengan penguatan fungsi whistleblower system, edukasi nilai integritas, serta peran aktif pemimpin dalam menjadi role model tata kelola yang baik (Supriyadi et al., 2023).
- Inovasi Teknologi untuk Transparansi. Penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan data analytics dan AI dalam proses akuntansi memiliki akurasi laporan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi risiko lebih cepat. Oleh karena itu, digitalisasi laporan harus menjadi bagian dari strategi GCG di era industri 4.0 (Nasution & Aini, 2022).

Pembahasan

Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara efektif merupakan elemen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Temuan ini konsisten dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dapat diminimalkan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Dalam konteks ini, GCG berfungsi sebagai sistem pengendalian untuk mengurangi asimetri informasi dan moral hazard.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang aktif dan dewan komisaris independen berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian oleh Wulandari et al. (2020) menegaskan bahwa perusahaan dengan struktur GCG yang kuat cenderung memiliki laporan yang lebih transparan. Hal ini sejalan dengan temuan Hermawan dan Siregar (2022) yang menyoroti pentingnya keahlian teknis dalam komite audit sebagai faktor penentu akurasi laporan keuangan. Dari objek penelitian yang dianalisis secara

fenomenologis, terungkap bahwa auditor internal yang memiliki latar belakang kuat di bidang akuntansi dan memahami nilai-nilai etis lebih mampu menolak intervensi manajemen dalam proses pelaporan.

Transparansi keuangan juga terbukti menjadi alat pencegah terhadap praktik penyimpangan dan korupsi. Seperti yang diungkapkan oleh Creswell (2021), perusahaan dengan tingkat transparansi yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Temuan ini juga ditemukan dalam wawancara dengan salah satu informan auditor internal yang mengungkapkan bahwa sistem pelaporan keuangan digital berbasis ERP membantu memperkecil ruang manipulasi data. Ini sesuai dengan pernyataan Hapsari dan Puspitasari (2022) bahwa digitalisasi keuangan meningkatkan integritas dan keandalan laporan.

Dalam kerangka teori stakeholder, transparansi laporan keuangan menjadi bagian dari pertanggungjawaban perusahaan kepada publik. Freeman (1984) menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada para pemangku kepentingan lain, termasuk karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Penerapan GCG di perusahaan yang menjadi objek studi menunjukkan adanya kesadaran manajer terhadap tuntutan ini. Namun, dari wawancara dengan beberapa informan dewan pengawas, masih terdapat hambatan budaya organisasi yang permisif terhadap ketertutupan informasi, sehingga menghambat implementasi prinsip transparansi secara menyeluruh.

Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan juga terbukti meningkat dengan penerapan GCG, khususnya dalam hal peran pengawasan internal dan audit independen. Hay dan Cordery (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas menuntut perusahaan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan keuangan kepada publik. Hal ini diperkuat dengan temuan Wijaya dan Puspitasari (2023) yang menunjukkan bahwa peran aktif komite audit dapat mencegah terjadinya penyimpangan akuntansi. Hasil observasi lapangan mendukung pendapat ini, di mana perusahaan dengan frekuensi audit internal yang tinggi cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih kredibel.

Secara empiris, penelitian ini mengonfirmasi hasil studi terdahulu oleh Rosnidah dan Saputra (2023) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen mampu menurunkan potensi rekayasa laporan keuangan. Dalam konteks perusahaan yang dikaji, keberadaan pengawas independen memberikan tekanan moral dan struktural pada manajer agar menyusun laporan yang objektif. Hal ini sejalan dengan konsep etika bisnis yang dikemukakan oleh

Kurniawan (2018), bahwa tata kelola yang baik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan refleksi dari integritas moral individu dalam organisasi.

Di sisi lain, tantangan dalam implementasi GCG di Indonesia masih cukup tinggi. Seperti diungkapkan oleh Santoso dan Putra (2022), budaya kolektif dan ketergantungan pada struktur hierarkis sering kali menghambat akuntabilitas. Dalam konteks ini, pendekatan fenomenologis membantu peneliti menggali pemaknaan subjektif para pengambil keputusan terhadap GCG. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian manajer masih menganggap GCG sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai sistem nilai yang mendasari perilaku organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai GCG masih menjadi pekerjaan rumah dalam banyak organisasi.

Lebih lanjut, temuan lapangan juga mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi informasi seperti sistem pelaporan real-time dan integrasi ERP menjadi pendorong transparansi yang signifikan. Sejalan dengan studi oleh Mulyadi dan Anwar (2020), penggunaan sistem informasi akuntansi modern memungkinkan deteksi dini terhadap potensi fraud serta mendorong pelaporan yang tepat waktu dan akurat. Dalam konteks perusahaan yang diteliti, digitalisasi pelaporan terbukti meningkatkan efisiensi, namun efektivitasnya tetap sangat bergantung pada komitmen etis dari manajemen puncak.

Dari pembahasan ini, terlihat bahwa penerapan prinsip GCG sangat erat kaitannya dengan kualitas pelaporan keuangan, baik dari sisi keterbukaan informasi maupun pertanggungjawaban keputusan keuangan. Namun demikian, efektivitas implementasi GCG tidak hanya ditentukan oleh struktur formal seperti adanya komite audit atau kode etik, tetapi juga oleh faktor budaya, komitmen moral, dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan pemahaman teoritis dan praktis mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan dan transparansi-akuntabilitas keuangan. Perbandingan dengan studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa terdapat kesinambungan temuan dalam literatur internasional maupun nasional. Namun, studi ini juga menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dan interpretatif dalam memahami praktik GCG, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten telah terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik bukan hanya sekadar kerangka administratif, tetapi menjadi value system yang mendasari praktik bisnis etis dan berintegritas. Temuan ini didasarkan pada analisis literatur mendalam dan interpretasi data empiris dari studi terdahulu, serta pengalaman langsung pelaku organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Penerapan GCG sebagai Pilar Transparansi Laporan Keuangan. Salah satu dimensi utama dalam GCG adalah keterbukaan informasi yang mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab manajemen kepada para pemangku kepentingan (OECD, 2015). Penelitian oleh Wulandari et al. (2020) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki struktur GCG yang kuat, termasuk komite audit yang independen dan aktif, cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diverifikasi oleh pihak eksternal. Ini dikarenakan keberadaan komite audit mampu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik modal (Bushman et al., 2004).

Hermawan dan Siregar (2022) juga memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa anggota komite audit dengan latar belakang akuntansi dan keuangan memiliki sensitivitas tinggi terhadap inkonsistensi atau potensi rekayasa laporan. Temuan ini selaras dengan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), di mana keberadaan mekanisme pengawasan internal dapat mengurangi moral hazard yang dilakukan oleh manajemen terhadap kepentingan pemilik.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Mencegah Distorsi Laporan Dalam konteks fenomenologis, hasil wawancara dan interpretasi literatur menunjukkan bahwa aktor-aktor internal seperti dewan komisaris independen memainkan peran penting dalam menjaga kualitas dan akurasi laporan keuangan. Syarif et al. (2021) menjelaskan bahwa pengawasan aktif yang dilakukan dewan komisaris secara signifikan mengurangi kecenderungan manajerial untuk memanipulasi laporan, terutama dalam perusahaan yang menghadapi tekanan kinerja jangka pendek.

Temuan ini diperkuat oleh Wijaya & Puspitasari (2023) yang menyatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai “watchdog” atas proses pelaporan, bukan hanya untuk kepatuhan

terhadap regulasi, tetapi juga untuk menjaga integritas data. Bahkan, perusahaan dengan komite audit yang secara rutin melakukan review laporan triwulanan, lebih cepat dalam mendeteksi kejanggalkan dibandingkan perusahaan yang hanya bergantung pada audit eksternal tahunan (Yuniarti et al., 2021). **Transparansi Laporan Keuangan sebagai Sarana Pencegahan Korupsi**

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa transparansi laporan keuangan berbanding terbalik dengan kecenderungan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana perusahaan. Studi Creswell (2021) menunjukkan bahwa perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka, terutama dengan pelaporan real-time berbasis sistem ERP, mengalami penurunan risiko fraud hingga 38% dibandingkan perusahaan dengan sistem pelaporan konvensional.

Penelitian yang dilakukan oleh Effendi et al. (2022) menyimpulkan bahwa perusahaan yang menerapkan financial disclosure policy secara aktif mampu mengelola ekspektasi investor dengan lebih baik, sekaligus meminimalkan spekulasi pasar yang berdampak negatif terhadap reputasi korporasi.

Teknologi informasi juga mendukung prinsip transparansi. Gunawan et al. (2022) menekankan bahwa penggunaan ERP dan business intelligence dashboard memberikan visibilitas penuh terhadap arus keuangan perusahaan, sehingga memperkuat akuntabilitas dan memperkecil ruang untuk manipulasi data.

Hambatan Implementasi GCG di Indonesia. Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GCG di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Dalam banyak kasus, pelaksanaan GCG hanya sebatas formalitas administratif untuk memenuhi kepatuhan regulasi, bukan sebagai nilai yang terinternalisasi dalam budaya organisasi (Santoso & Putra, 2022).

Yulianto & Sulaiman (2023) mencatat bahwa banyak perusahaan—terutama BUMD dan sektor non-keuangan—belum memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif. Hal ini diperparah dengan minimnya pelatihan etika keuangan, kurangnya pemahaman akan pentingnya keterbukaan, dan rendahnya literasi keuangan di kalangan top-level management.

Selain itu, praktik "window dressing" masih sering ditemukan, terutama menjelang audit tahunan atau proses penilaian eksternal. Fenomena ini menandakan bahwa masih terjadi

pemisahan antara kepentingan manajemen dan prinsip tata kelola yang seharusnya dijunjung tinggi secara substansial (Puspitasari & Khairunnisa, 2020).

Rekomendasi Strategis dan Implikasi Kebijakan. Merujuk pada temuan tersebut, maka terdapat beberapa strategi dan rekomendasi kebijakan yang relevan: Penguatan Kerangka Regulasi

Pemerintah, melalui OJK dan Kementerian BUMN, perlu memperbarui standar GCG dengan mengacu pada praktik global terbaru, termasuk kewajiban integrasi teknologi pelaporan berbasis digital serta penguatan sanksi terhadap perusahaan yang gagal memenuhi prinsip keterbukaan informasi (OECD, 2020).

Peningkatan Kompetensi SDM Tata Kelola. Perusahaan harus melakukan program capacity building berkelanjutan bagi anggota komite audit dan dewan komisaris. Hal ini penting untuk mendorong pemahaman terhadap prinsip etika, audit internal, dan keterbukaan data keuangan (Kusumawardani et al., 2021).

Transformasi Budaya Organisasi. Pendekatan kultural perlu dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas ke dalam code of ethics perusahaan. Hal ini dapat dimulai dengan penguatan fungsi whistleblower system, edukasi nilai integritas, serta peran aktif pemimpin dalam menjadi role model tata kelola yang baik (Supriyadi et al., 2023).

Inovasi Teknologi untuk Transparansi. Penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan data analytics dan AI dalam proses akuntansi memiliki akurasi laporan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi risiko lebih cepat. Oleh karena itu, digitalisasi laporan harus menjadi bagian dari strategi GCG di era industri 4.0 (Nasution & Aini, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Bushman, R., Chen, Q., Engel, E., & Smith, A. (2004). Financial Accounting Information, Organizational Complexity and Corporate Governance Systems. *Journal of Accounting and Economics*, 37(2), 167–201.
- Creswell, J. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Effendi, M. A., et al. (2022). The Impact of Financial Disclosure on Corporate Reputation. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15(2), 87–103.

- Gunawan, A., Wijaya, R., & Dewi, L. (2022). ERP Implementation and Financial Transparency in Indonesian Manufacturing Companies. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 133–145.
- Hermawan, A., & Siregar, S. V. (2022). Audit Committee Characteristics and Earnings Quality. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(1), 11–25.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kusumawardani, R., et al. (2021). Board Education, Competence and Governance Quality. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 11(2), 90–97.
- OECD. (2015 & 2020). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing.
- Puspitasari, D., & Khairunnisa, A. (2020). Fraudulent Financial Reporting in Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 181–194.
- Santoso, B., & Putra, A. (2022). Organizational Culture and GCG Implementation: A Qualitative Study. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 57–72.
- Syarif, M., Rachmawati, H., & Anisa, F. (2021). The Role of Independent Commissioners in Enhancing Transparency. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(2), 104–115.
- Wijaya, A., & Puspitasari, D. (2023). Audit Committee Effectiveness and Financial Statement Accuracy. *Journal of Contemporary Accounting*, 9(3), 75–90.
- Wulandari, R., Hasanah, N., & Zakiyah, L. (2020). The Effectiveness of GCG in Improving Financial Statement Transparency. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 18(2), 129–140.
- Yulianto, M., & Sulaiman, M. (2023). The Barriers of GCG Implementation in Indonesian State-Owned Enterprises. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 25(1), 41–60.
- Yuniarti, A., Fitria, H., & Nugroho, R. (2021). Internal Audit Performance and Financial Accountability. *Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 234–245